

Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Oleh :

Khairul Rahman

Email : khairul_rahman87@yahoo.co.id

*Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau, Jl. Kaharudin Nasution Km 11, No 113 Marpoyan
Simpang Tiga Pekanbaru dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu
Pemerintahan UNPAD*

ABSTRAK

Kegagalan pelaksanaan pembangunan desa selama ini mengakibatkan desa masih dianggap sebagai mata rantai terlemah dalam sistem pemerintahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal pembangunan dan kesmiskinan. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dikarenakan faktor internal (dalam diri masyarakat itu sendiri) dan faktor eksternal (yang berada pada luar diri masyarakat) yang kemudian tidak memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Program pembangunan yang berdasarkan partisipasi masyarakat tentunya bersumber dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang memungkinkan program akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk mengatasi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa maka diperlukan konsep "pemberdayaan" partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena pemberdayaan adalah jalan menuju partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Kata Kunci : Pemberdayaan, Partisipasi, Pembangunan

Execution of development countryside failure during the time result countryside still be considered to be by a link run down in governance system which require to get attention in the case of and kesmiskinan development. One of his/its cause is its weakness participate society in development, internal dikarnakan factor (in x'self society itself) and eksternal factor (what be at outside society self later do not enable society to participate in development. Program development which is pursuant to partisipasi socialize perhaps stem from society demand and requirement enabling program will walk better in line with development to be secure and prosperous socialize. To overcome participate society in pemnbangunan countryside is hence needed by a concept " enableness" participate society in development, because enableness is road;street go to participation socialize in development.

Keyword : Enableness, Participate, Development.

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan di Indonesia. Desa merupakan mata rantai dari sistem pemerintahan nasional yang bermula dari sistem pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan Desa yang merupakan mata rantai yang terakhir. Desa merupakan pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama. Tercapainya tujuan Negara sangat ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan pembangunan desa.

Selama ini desa di Indonesia masih merupakan mata rantai terlemah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dari berbagai sumber dan fenomena yang ada dilapangan dimana desa dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat, rendahnya produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kualitas lingkungan pemukiman pedesaan, lemahnya akses masyarakat dalam pembuatan keputusan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, desa dalam perkembangannya mengalami keterbatasan dan keterlambatan, sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan dan perkembangan kota.

Salah satu ciri atau kelemahannya desa selama ini disebutkan adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. USAID(2007:3) menyebutkan ada 4 jenis kelemahan yang mempengaruhi kualitas dan efektifitas partisipasi yaitu :

1. Belum meratanya kemauan politik maupun pemahaman di jajaran pemerintahan (desa) tentang pentingnya dan keuntungan konkrit apa yang bisa diperoleh dari proses partisipasi.
2. Kebijakan dan peraturan yang mengatur proses partisipasi dalam tata pemerintahan tidak cukup mengikat dan tidak memberikan insentif yang cukup berarti untuk diterapkan secara serius dan berkelanjutan
3. Forum-forum warga atau forum multi-pihak yang berpotensi menjadi media penyalur suara seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan

mempertahankan diri menjadi lembaga yang demokratis dan kuat.

4. Para perencana, pelaksana dan fasilitator program partisipatif sering menghadapi kesulitan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana caranya” menjalankan suatu mekanisme atau prosedur baru yang partisipatif? Bagaimana agar warga bisa berpartisipasi secara efektif dan agar tidak terjadi dominasi kepentingan tertentu dalam suatu forum partisipatif?”

Kemudian Awang (2010) mengatakan permasalahan yang dihadapi adalah desa-desa telah kehilangan identitas dan semangat partisipatif, karena hilangnya fungsi dan struktur yang mereka anggap baik selama ini. Sebab kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun melalui mesin politiknya begitu efektif menghapus sebagian besar semangat, sifat, dan karakteristik asli oronomi desa. Desa telah kehilangan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri sehingga menjadi tidak berdaya, miskin, tertinggal, dan termarjinalkan.

Lemahnya partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh Rahman (2014:58) bahwa pembangunan pedesaan yang berjalan belum sepenuhnya berdasarkan partisipasi masyarakat, pembangunan desa yang belum terintegrasi serta kebijakan-kebijakan pembangunan desa belum optimal melakukan pro poor, pro job dan pro growth. Serta kebijakan pembangunan yang belum mampu menggambarkan karakteristik dari desa tersebut.

Pembangunan pedesaan selama ini hanya dipahami secara utuh sebagai pembangunan dalam bidang perekonomian, padahal hal penting yang juga harus dipahami dalam pembangunan desa adalah kehidupan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Kehidupan sosial yang demokratis dan berkeadilan dimaksudkan bagaimana pembangunan yang berlangsung di desa berjalan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. keberhasilan program/proyek pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagai penerima dari kegiatan pembangunan.

Pembangunan desa sangat besar kaitannya dengan pembangunan nasional dikarenakan sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan, selain jumlah penduduk terbesar

berada di desa, mata pencarian di pedesaan ternyata memberikan sumbangsih besar bagi kemandirian bangsa ini. Sebagai ujung tombak pembangunan sebuah daerah, maka sangat penting untuk memberikan perhatian dan prioritas pembangunan pada desa.

Dipertegas oleh Adisasmita (2006:3) Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat pada keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Secara realitas, masyarakat mengalami berbagai macam persoalan yang membuat desa tidak berkembang. Pada dekade tahun tujuh puluhan, Schumacher dalam bukunya "*Small is Beautiful*" (1979:162) telah mengingatkan bahwa persoalan pokok yang dihadapi Negara-negara berkembang terletak pada dua juta desa yang miskin dan terbelakang. Atas dasar itu maka pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan perlu dilakukan untuk menciptakan kemandirian, kemajuan, kesejahteraan dan keadilan.

Menurut Soleh (2014:105) paling tidak ada dua sasaran pemberdayaan yang dapat dicapai yaitu pertama, terlepasnya mereka dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Sasaran ini terikat dengan problem pangan, sandang, papan/perumahan dan kesehatan, sementara sasaran kedua adalah semakin kuatnya posisi mereka baik dalam struktur sosial ekonomi dan kekuasaan. Pemberdayaan berarti merupakan proses partisipatif yang memberikan yang memberikan kepercayaan (*trust*) dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah dan merumuskan program/kegiatan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Jika diperhatikan dan dideskripsikan mengenai partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di banyak desa (atau dengan sebutan lain) di Indoensia, jika membaca berbagai hasil penelitian, diskusi ilmiah, dan berbagai tulisan baik di jurnal dan buku teks dimana desa dihadapkan pada lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lemahnya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan bisa dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berada pada diri pribadi masyarakat itu sendiri berupa: sifat malas, budaya apatis, tidak mau melakukan perubahan dan pembaharuan dan lemahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sedangkan faktor eksternal berada pada luar diri masyarakat yang berkaitan dengan dukungan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan berupa kebijakan, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak adanya bantuan baik bersifat materi maupun dalam bentuk pengarahan. Melihat dua hal diatas, menjadikan masyarakat tidak memahami pentingnya pembangunan yang berdampak pada pembangunan yang tidak berjalan dengan dasarnya pada kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga bisa dipatikan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

Jika mengutip pendapat Wasistiono dan Irwan Tahir (2006:86-89) ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi berbagai program penguatan otonomi desa. Dalam hal ini penulis menghubungkan dengan lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan diantaranya :

1. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat,
2. Rendahnya kualitas SDM di pedesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
3. Kelembagaan di tingkat desa belum sepenuhnya tertata dengan baik,
4. Lemahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa dan masih bersifat parsial

Fenomena dilapangan selama ini program pembangunan masih banyak menggunakan pola yang tidak menyertakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan bersapak pada sisi pemanfaatan dari kebijakan pembangunan. bahkan pola-pola seperti musyawarah rencana pembangunan desa selama ini hanya dipahami sebagai formalitas semata yang berujung akan melemahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam berbagai kegiatan pemerintahan di desa yang berkaitan dengan kegiatan/program/proyek pembangunan terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat

dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, namun demikian tak jarang masyarakat tidak diikuti sertakan dan masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi dan menentukan keputusan yang dibuat berkaitan dengan pembangunan. keadaan seperti inilah yang kemudian menimbulkan masyarakat menjadi apatis dalam kegiatan-kegiatan partisipatif. Berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan dapat dipastikan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada partisipasi masyarakat didalam pelaksanaannya.

Dari latar belakang diatas telah disampaikan bahwa salah satu masalah yang dihadapi desa di Indonesia adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam tulisan gagasan konseptual ini memberikan pemahaman bagaimana sesungguhnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi pembangunan dan pemberdayaan sebagai strategi untuk menanggulangi kemiskinan.

PEMBAHASAN

Menurut Paul (1987:132) menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politik kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Apa yang disampaikan oleh Paul diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Person (dalam Mardikanto dan Poerwoko S, 2013:29) pemberdayaan adalah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Demikian pula Ife (1995:182) pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan/pejuang, pengetahuan dan

keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat itu dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan partisipasi masyarakat menurut Wasistiono adalah menciptakan kemandirian masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek (pelaku) pembangunan. Wasistiono (2003:60) Pemberdayaan adalah upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya sehingga mampu mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri. Dengan demikian inti pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian, baik dari individu, kelompok maupun masyarakat.

Jadi pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan saat ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang selama ini lemah dalam pembangunan, dengan kata lain untuk meningkatkan/mengembangkan kemampuan masyarakat yang selama ini belum dimanfaatkan potensinya dalam pembangunan. Pola yang menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan telah membuat masyarakat menjadi tidak mandiri, pemberdayaan memberikan ruang untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemberdayaan sesungguhnya diarahkan kepada bagaimana masyarakat desa mampu mandiri, menguasai atau berkuasa atas kehidupannya sehingga memberikan sumbangsih kepada tujuan pembangunan nasional. Pemberdayaan dalam konteks ini diartikan sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat agar masyarakat lebih lebih berdaya untuk menyamapiakan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan memanfaatkan program/proyek pembangunan.

1. Pemberdayaan Sebagai Proses Partisipasi dan Bagian dari Strategi Pembangunan

Pemberdayaan sebagai suatu proses menuju perubahan memerlukan berbagai cara dan inovasi yang mampu memberikan sumbangsih pemikiran/ide, produk, gagasan, metode peralatan atau teknologi ke arah perubahan. Oleh karena pemberdayaan sebagai suatu proses bukanlah suatu cara

yang sederhana. Untuk mencapai partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan banyak hal yang mendukungnya, mulai dari sumber daya manusia yang tersedia, kelembagaan yang ada di tingkat desa dan peran-peran yang dijalankan oleh pemerintah, aktivis LSM, tokoh masyarakat dan fasilitator.

Menurut Soleh (2014:105) mengatakan pemberdayaan berarti merupakan proses partisipatif yang memberikan kepercayaan (*trust*) dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah dan merumuskan program/kegiatan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Nasdian (2014 : 91) mengatakan selama ini pemberdayaan merupakan *the missing ingredient* dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Secara sederhana, pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumber daya yang penting. Sintesis antara pengertian pemberdayaan dan partisipasi akhirnya menghasilkan pengertian:

“...what gives real meaning to (popular) participation is the collective by the people concerned to pool their efforts and whatever other resources they decide to pool together, to attain objectives they set for themselves. In this regard participation is viewed as an active process in which the participants take initiatives and action that is stimulated by their own thinking and deliberation and over which only involves the people in actions that have been thought out or designed by others and are controlled by others is unacceptable” (Percy-Okunla, 1986)

Dari pengertian diatas, jelas bahwa antara konsep pemberdayaan dan konsep partisipasi memiliki keterkaitan yang sangat kuat, dalam ranah aplikasi bisa dijelaskan bahwa lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikarenakan lemahnya pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki akses atau ketidak mampuan berpartisipasi dalam pembangunan. pernyataan Craig and Mayo (1995), menegaskan “*empowerment is road to participation*” pernyataan ini cukup menyakinkan kepada kita bahwa pemberdayaan dan partisipasi adalah sangat relevan dan memiliki keterkaitan yang erat.

Pemberdayaan sebagai proses pengembangan partisipasi pada intinya memberikan kesempatan pada masyarakat untuk turut serta (melalui partisipasi) dalam pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan sampai kepada pemanfaatannya melalui pengalaman langsung. Pemberdayaan partisipasi masyarakat bisa menjadikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Konsep pemberdayaan lahir karena adanya dua premis mayor, yaitu adanya kegagalan dan harapan (Friedman, 1992:82) yang menegaskan, adapun yang dimaksud sebagai kegagalan adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan secara keberlanjutan. Selanjutnya, harapan muncul oleh karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai—nilai demokratis, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Oleh karena kemudian Friedman melanjutkan penjelasannya bahwa pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individu.

Menurut Adisasmita (2011:131) Pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, dan **anggota masyarakat** untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. **Terdapat keterkaitan yang sangat erat anatara pemberdayaan masarakat sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran pembangunan masyarakat dalam rangka wewujudkan keberhasilan pemerinatahan daerah/desa.**

Wasistiono (2003:60-61) mengatakan pemberdayaan dilakukan dalam rangka mengisi strategi besar (*grand strategis*) pembangunan masyarakat sipil (*civil society*) yang merupakan kosekuensi logis digunakannya nilai-nilai universal (*universal values*) yakni demokratis. Agar masyarakat desa dapat meningkatkan peranan penting dalam peruses pembanguan bangsa, sejajar dengan komponen masyarakat lainnya, diperlukan kemauan politik (*political will*) dan tindakan politik

(*political action*) dari pemerintah maupun komponen bangsa lainnya.

Sejak tahun 1970-an pemberdayaan menjadi sebuah pemahaman dan acuan baru dalam pembangunan, kemudian mempengaruhi seluruh sektor kehidupan. Pemberdayaan pun dimaknai berbeda-beda oleh para ahli yang membidangi, seperti ilmu politik secara sederhana pemberdayaan diartikan pemberian kekuasaan dan dalam ilmu ekonomi lebih dilihat sebagai upaya untuk member daya dan bukan kekuasaan. Dalam konteks ini dari sudut ilmu pemerintahan, pemberdayaan diartikan sebagai pelibatan masyarakat dengan memberikan ruang untuk turut serta (berpartisipasi) dalam setiap proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pemanfaatan).

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat yang Diharapkan dalam Pembangunan.

Seperti ungkapan yang telah disampaikan, pemberdayaan adalah jalan menuju partisipasi. Kemudian partisipasi masyarakat itu sendiri pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Conyers (dalam Solekhan, 2014:141) menyebutkan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan akan gagal
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu, dan
- c. Dalam perspektif demokratis bahwa partisipasi itu merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan.

Arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan tentunya tidak bisa diragukan lagi selain dari hal diatas, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaannya bisa mewujudkan pemerintahan desa yang responsif, komunikatif, demokratis, bertanggungjawab,

dan transparan. Maka kemudian partisipasi masyarakat seperti apa yang diharapkan dalam pembangunan? Menurut Adisasmita (2006:34) partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat desa.

Menurut Rusidi (dalam Solekhan, 2014:152) menyebutkan ada empat dimensi dalam berpartisipasi, yang terdiri dari: (1) sumbangan pemikiran (ide atau gagasan), (2) sumbangan materi (dana, barang dan alat), (3) sumbangan tenaga (bekerja), (4) memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan".

Menurut Ndraha (1990) bentuk partisipasi masyarakat, apabila dilihat dari proses pembangunan suatu program pembangunan, mulai dari gagasan sampai pada bentuknya sebagai bangunan, maka partisipasi itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) partisipasi yang dilakukan sepanjang proses atau yang bisa dinamakan partisipasi prosesional, dan (2) partisipasi yang hanya dilakukan pada satu atau beberapa fase saja, yang biasanya dinamakan partisipasi parsial.

Pada kegiatan pembangunan yang demokratis tentunya partisipasi yang diharapkan kepada masyarakat adalah partisipasi yang lebih mengarah kepada partisipasi prosesional samapai kepada pemanfaatannya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menerima dan memiliki rasa memiliki atas program/proyek pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa.

Menurut Soleh (2014:112) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan manifestasi dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab terhadap upaya memperbaiki kualitas hidup bersama. Partisipasi masyarakat tersebut cukup luas cakupannya, diantaranya: (1) partisipasi dalam proses perencanaan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi dan (4) partisipasi dalam pemanfaatan.

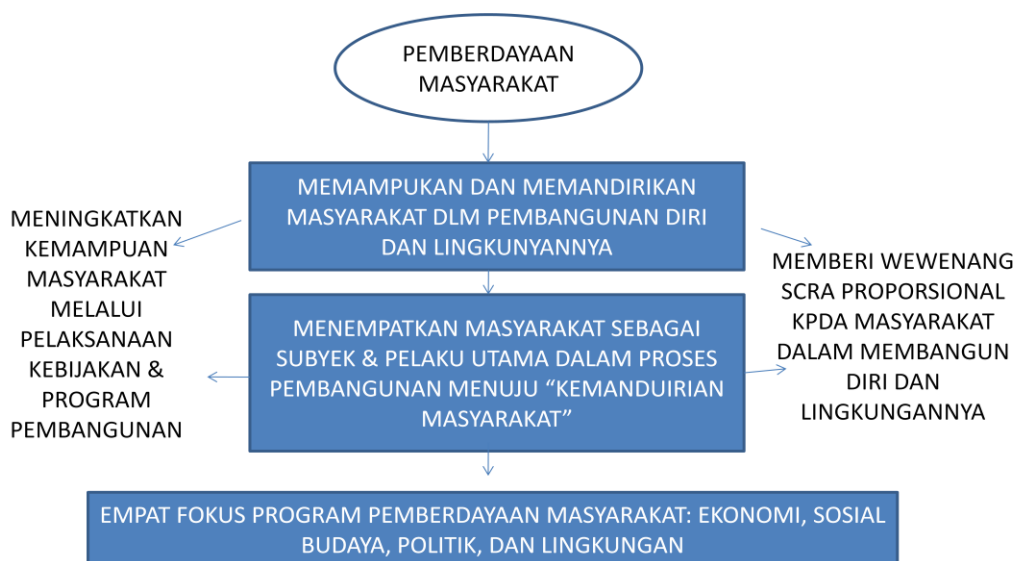
Kemudian menurut Cohen dan Uphoff dalam Ndraha (1990:104) yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi warga itu dapat dibagi menjadi 4 (empat) bentuk partisipasi, terdiri dari: 1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in*

decision making), 2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*), 3) Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*), dan 4) Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah

kemiskinan juga berkorelasi dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, karena jika masyarakat sudah terlepas dari masalah kemiskinan maka masyarakat bisa berdaya dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai pembangunan nasional yakni mensejahterakan masyarakat. Namun dalam konteks tulisan ini (pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan) sesungguhnya menitik beratkan pada “keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan”.



Gambar diatas memperlihatkan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Adisasmita (2011 : 133) Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk mengembangkan dan mendorong peran serta aktif dan pelibatan anggota masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang telah lama dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selama ini telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan dari aspek ekonomi, sosial dan politik.

Tujuan pemberdayaan yang disampaikan merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Berbagai kegiatan pemberdayaan dengan tujuannya tidak akan berhasil apabila tidak ada partisipasi masyarakat dalam

pembangun, oleh karena gagasan konseptual mengenai pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan.

Jika dicermati adaprogram yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberdayakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal itu bisa dilihat dari program-program pemberdayaan yang menitik beratkan masyarakat sebagai subjek (pelaku) pembangunan dalam arti masyarakat yang merencanakan sesuai dengan kebutuhan dan tuntan masyarakat desa, kemudian masyarakat pula yang melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan memanfaatkan hasil program pembangua tersebut.

Jadi Keberhasilan program-program pemberdayaan yang berbasis pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan sangat ditentukan jika program tersebut tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaanya, tidak ada unsur politik yang

mementingkan sekelompok orang tertentu, adanya pengarahan, bimbingan dan pendampingan yang benar sesuai dengan kaedah pemberdayaan, sertayang terpenting lainnya adalah adanya partisipasimasyarakat dalam pembangunan dengan, jika ada partisipasi masarakat dalam pembangunan berarti ada pemahaman dan dukungan masyarakat. Oleh karena diperlukan pemeberdayan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Indonesia.

4. Aspek Penting Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Pelaksanaan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk menyadarkan, mengembangkan dan mendorong peran serta aktif masyarakat dan melibatkan anggota masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. masyarakat dan semua pihak yang terlibat perlu memahami bahwa keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaannya.

Wasistiono (2003:60) Pemberdayaaan orang, kelompok atau masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain :

- a) Memeberi kebebasan yang lebih luas untuk megambil tindakan-tindakan tertentu
- b) Memberikan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan sesuatu
- c) Memberikan ases yang lebih luas, baik berupa akses kepada pengambil keputusan, akses dukungan pembiayaan maupun akses-akses lainnya yang diperlukan untuk membangun kemandirian
- d) Membangun karakter yang mengarah pada kemandirian

Berkaitan dengan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembanguan juga haru dimulai dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam merencnaka atau tindakan-tindakan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka, kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan program pembangunan desa. pemebrdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak berhenti dalam tahap keikutsertaan mereka dalam perencanaan, selama ini masyarakat hanya dilibatkan dalam perencanaan namun hal lain yang diperlukan adalah bagaimana masyarakat

juga bisa menentukan dalam pengambilan keputusan sehingga masyarakat tidak dikecewakan (menimbulkan sikap apatis) dengan rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya, jika urutan-ururan ini dilakukan maka ini akan menjadi pembelajaran yang kemudian menciptakan kemandirian desa dalam pembangunan dan kemandirian itu lebih dekata kepada keberhasilan pemabangunan desa partisipatif.

Soleh dalam bukunya "*Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*" (2014:106) merangkum lebih rinci, aspek-asepek dalam permberdayaan partisipasi. Dalam proses pemberdayaan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan guna mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap program/kegiatan pembangunan. aspek-aspek dimaksud adalah:

1. Program/kegiatan harus disusun oleh masyarakat itu sendiri
2. Program/kegiatan tersebut diyakini dapat memecahkan masalah yang dihadapi
3. Pemberdayaan baik pihak pemerintah maupun pihak luar lainnya harus mendukung sebesar mungkin partisipasi masyarakat, baik kelompok miskin, perempuan, buta huruf dan masyarakat tuna daya lainnya
4. Penggunaan sumberdaya sumberdaya lokal
5. Program/kegiatan disusun haruslah memperhatikan nilai-nilai budaya setempat dan memperhitungkan dampak lingkungan yang terjadi
6. Tidak berakibat terciptnya ketergantungan (mampu memandirikan)
7. Dilakukan secara bersama-sama dalam posisi kesetaraan
8. Harus mampu dilanjutkan sendiri oleh masyarakat tanpa campur-tangan pihak luar.

Usaha untuk mengajak dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus dimulai dengan menunjukkan bahwa program pembangunan yang ada diperuntukkan untuk mereka. Sehingga dengan demikian masyarakat disadarkan bahwa partisipasi mereka dalam pembangunan adalah dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan mereka dan lingkungan sekitar merka dari ketertinggalan dan kemiskinan.

Ada hal penting yang perlu dipahami dalam proses kegiatan pemebrdayaan

partisipasi masyarakat desa, dimana desa itu sendiri memiliki karakteristik dan kekhasannya maka pemberdayaan haruslah melihat dari sisi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang khas tersebut, setiap individu masyarakat adalah sebuah entitas yang unik yang mewarnai setiap masyarakat desa, tidak bisa pemberdayaan partisipasi masyarakat dengan cara-cara menakutkan dan berdasarkan kehendak sekelompok orang atau penguasa. Dengan demikian pembedayaan partisipasi masyarakat desa akan menciptakan karakter tersendiri yang menunjang akan keberagaman dalam kontes Negara kesatuan.

Pemberdayaan partisipasi masyarakat desa sebenarnya bisa juga dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan desa dengan cara mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. lembaga-lembaga masyarakat desa terdiri dari atas lembaga formal dan nonformal. Lembaga formal itu adalah lembaga yang didirikan atau disponsori oleh pemerintah dan mungkin dibiayai oleh pemerintah (pusat, daerah dan desa). Sedangkan lembaga non formal ialah lembaga yang diperkasai oleh masyarakat, berdasarkan keinginan dan inisiatif masyarakat sendiri dimana pembiayaannya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat. Apabila lembaga kemasyarakatan desa tersebut mampu difungsikan dengan baik maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dioptimalkan. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan dikarenakan pendidikan dia bisa belajar dan menyalurkan aspirasi pembangunannya kepadalembaga yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sebagai warga masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan salah satu aspek yang bisa diarahkan dalam proses pemberdayaan partisipasi masyarakat. Melalui mengutakan tugas dan fungsinya diharapkan ini bisa memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan. kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nurcholis (2011;148) bawa semua lembaga di desa baik yang formal maupun non formal dibentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah di bidang politik, ekonomi, sosial,

budaya, adat, dan keamanan. Dengan pembentukan lembaga-lembaga seperti itu, maka kebutuhan masyarakat desa yang berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, adat dan keamanan akan terpenuhi.

Berpedoman kepada konsep pemberdayaan yang ada, untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dibutuhkan perbaikan di tingkat desa, dalam hal sebagai berikut :

1. Adanya keterbukaan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat (berpartisipasi) dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa. Keterbukaan disini memungkinkan masyarakat untuk menyusun program/kegiatan pembangunan dan memiliki akses dalam pengambilan keputusan.
2. Menumbukan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan mengevaluasi, dan pemanfaatannya. Hal ini bisa dilakukan melalui program pemberdayaan oleh pemerintah maupun akademisi dengan memberikan penyuluhan, pengarahan dan pendampingan kepada masyarakat.
3. Diperlukan Sinergisitas antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pembangunan di desa. Jika tidak ada sinergisitas antara tiga unsur penting tersebut maka akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena merupakan suatu rangkaian sistem.
4. Memfungsikan dan mempekuat lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan, bimbingan baik oleh pemerintah ataupun oleh akademisi yang membidangi
5. Menciptakan iklim politik yang kondusif sebagai dukungan keberhasilan bagi pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
6. Menumbuhkan kemandirian desa. Ada korelasi yang sangat kuat antara partisipasi masyarakat dengan kemandirian desa. Desa yang tidak mandiri ditunjukkan dengan lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. sedangkan desa mandiri

ditunjukkan dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. sehingga ketergantungan desa terhadap bantuan pemerintah bisa dikurangi dan tidak menjadikan desa serba menunggu dan meminta arahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Menurut Wasistiono (2003:61) Proses pemberdayaan masyarakat Desa ditentukan oleh dua faktor yakni faktor eksogen dan endogen. Faktor eksogen adalah faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat desa, baik berupa kebijakan pemerintah, bantuan biaya, bantuan tenaga penyuluh dan lain sebagainya. Sedangkan faktor endogen adalah faktor dari dalam yang dapat berupa tata nilai, adat kebiasaan, sikap mental dari masyarakat itu sendiri dan lain sebagainya.

Lingkup dari pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkaitan dengan tulisan ini lebih berkaitan dengan lingkup bina manusia dan bina kelembagaan. Bina manusia dimaksudkan bagaimana manusia (warga masyarakat) bisa berpartisipasi (ikut serta) dalam setiap proses pembangunan dan lingkup kelembagaan dimaksud bagaimana kelembagaan memberikan ruang dan kesempatan kepada warga masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Langkah-langkah pemberdayaan partisipasi masyarakat bukanlah hal yang mudah. Seperti yang dikatakan oleh Wrihatnolo (2007:2) menjelaskan bahwa pada dasarnya pemberdayaan itu adalah "proses menjadi" dan bukanlah sebuah "proses instan". Karena sebagai sebuah proses, pemberdayaan itu memiliki tiga tahapan yaitu: 1) tahap penyadaran, 2) tahap pengkapasitasan, dan 3) tahap pendayaan.

Berbagai upaya tersebut juga harus dibarengi dengan program-program pemberdayaan partisipasi masyarakat yang sifatnya lebih menenyentuh kepada masyarakat seperti, melalui pemberian contoh dari aparat pemerintah desa, melalui penyuluhan baik oleh pemerintah (pusat, daerah dan desa) juga bisa dilakukan oleh akademisi yang bergerak dalam hal pembangunan desa, upaya-upaya pemberdayaan partisipasi masyarakat harus direalisasikan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan melalui proses pembelajaran yang kontinyu baik dari lembaga kemasyarakatan yang ada atau dari pendamping desa yang sering

disediakan dalam pelaksanaan program/proyek pembangunan serta unsur-unsur yang ada dalam pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki arti yang sangat penting, program/proyek/kegiatan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada partisipasi masyarakat didalamnya, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang menerima dampak dari setiap program pembangunan. pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menekankan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan namun masyarakat juga harus menjadi subjek pembangunan yang turut serta memperjuangkan kesejahteraan bagi mereka dan dalam rangka tujuan yang lebih besar mencapai pembangunan nasional yang mensejahterakan. Pemberdayaan partisipasi masyarakat suatu konsep yang menekankan pada harapan pembangunan yang berkelanjutan.

Aspek-aspek yang harus dilakukan dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat desa yang masih lemah dalam pembangunan diantaranya, menekankan pada pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan, pemberian kesempatan itu mulai dari membuat pilihan, merencanakan, akses mengambil keputusan, merencanakan, mengawasi, mengevaluasi dan sampai kepada pemanfaatannya. Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat haruslah melalui proses pembinaan dan pengarahan agar tujuan tepat sasaran. Selanjutnya aspek lain yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat adalah kebijakan (aturan) yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi, adanya keterbukaan pemerintahan desa, mengoptimalkan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa.

Urgensi dari pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni pertama, adanya perhatian dan kepeduan masyarakat terhadap lingkungan (desa) yang menjadi modal awal dalam pembangunan desa. Kedua, kuatnya posisi masyarakat dalam struktur sosial ekonomi dan kekuasaan. Ketiga masyarakat menjadi mitra dengan pemerintahan desa yang memungkinkan terciptanya sinergitas dalam pembangunan desa. Keempat pembangunan akan tepat sasaran karena berasal dari kebutuhan dan keinginan

masyarakat. Kelima, program pembangunan yang berasal dari kebutuhan dan keinginan masyarakat akan membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan, dan Ketujuh, keberhasilan pembangunan desa akan memberikan dampak yang besar kepada pembangunan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- . 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pemerintah Desa Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Pekanbaru: Alaf Riau: Jurnal Kybernologi Indonesia Vol. 1, No. 1, Juli 2010
- Ife, J.W. 1995. *Community Development; Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practive*. Australia: Longman
- Rahman, Khairul. 2014. *Koordinasi Penataan Pembangunan Pedesaan Di Wilayah Provinsi Riau*. Pekanbaru: PSMIP UIR: Jurnal Kajian Pemerintahan, Vol. 3, No. 2, September 2014
- Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Paul, S. 1987. *Community Partisipation in Devel;opment Project. The Word Bank Experience*. Washington, D.C: The World Bank.
- Schumacher, E.F. 1979. *Kecil Itu Indah – Ilmu Ekonomi Yang Mementingkan Rakyat Kecil* (terjemahan). Jakarta: LP3ES
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press
- Soleh. Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia
- Wasistiono, Sadu. 2003, *Kapita Seleкта, Manajemen Pemerintah Daerah*. Bandung: Fakusmedia
- Wasistiono dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia